

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. Buku

- Darwin. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta.: Mitra Wacana Media.
- H.A.W. Widjaja. 2003. *Otonomi Desa*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Imam Soebechi. 2012. *Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta : Sinar Grafika.
- J. Kaloh. 2007. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Jum Anggraini. 2012. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Juniaris Ridwan. Achmad Soedik Sudrajat. 2009. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Layanan Publik*. Bandung : Nuansa Cendikia.
- KBBI Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2002. Jakarta
- Philipus M Hadjon. "Tentang Wewenang" dalam Makalah Universitas Airlangga. Surabaya : Universitas Airlangga.
- Prajudi Atmosudirjo. 1981. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : Ghana Indonesia.
- Rusadi Kartawira. 1998. "Hukum dan Kekuasaan" dalam Makalah. Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia.
- Suharizal, Muslim Chaniago. 2017 *Hukum Pemerintah Daerah Setelah Perubahan UUD 1945*. Padang : Thafa Media.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI-Press.
- Titia Tauhiddah. 2016. "Skripsi Hukum. Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar di Kecamatan Lubuk Basung. Kabupaten Agam. Padang" dalam skripsi hukum. Padang : Universitas Andalas.
- Waluyo. 1990. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.
- Wirawan B Ilyas, Richard Burton. 2013. *Hukum Pajak*. Jakarta : Salemba.

Zainal Asikin Amiruddin. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Mataram : Raja Grafindo Persada.

Zainuddin Ali. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.

## **B. Peraturan Prundang-Undangan**

Undang – Undang Dasar 1945

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

Peraturan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Keputusan Walikota Padang Nomor 112 Tahun 2009 tentang Penetapan TPU Bungus Teluk Kabung Sebagai Tempat Pemakaman Umum Etnis Tionghoa dan Penunjukan See Hin Kiong Sebagai Mitra Pemerintah Kota Padang

## **C. Website**

<http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-pengertian-retribusi-subjek.html>, Diakses pada Selasa 12 Mei 2015, 07:00 WIB

[https://digilib.unila.ac.id%2F525%2F8%2FBAB%2520III.pdf&usg=AOvVaw03e4j4JZ8g8eJM\\_asRn46R](https://digilib.unila.ac.id%2F525%2F8%2FBAB%2520III.pdf&usg=AOvVaw03e4j4JZ8g8eJM_asRn46R)

<http://fajri-fafa.blogspot.co.id/2013/11/teknik-sampling-probabilitas-dan-non.html>, Diakses pada Rabu 6 November 2013, 13:00 WIB.

<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/05/27/np0djq-perda-kota-padang-dinilai-ancam-budaya-masyarakat-tionghoa>, diakses pada Rabu, 27 Mei 2015, 20:57 WIB.

<http://www.padang.go.id/gambaran-umum-kota-padang>

<https://padang.go.id/sejarah-kota-padang>

<http://www.portal-statistik.com/2014/02/teknik-pengambilan-sampel-dengan-metode.html>, Diakses pada Kamis 20 Februari 2014, 12:30 WIB.

